

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kajian mengenai *corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat ditarik sebuah pertanyaan tentang penerapan *corporate governance* di Indonesia.

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat

dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (Price Waterhouse dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006)

Masalah *corporate governance* dapat ditelusuri dari pengembangan teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi yang demikian ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004).

Asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham, adanya pemisahan kepemilikan, tujuan manajemen dan pemegang saham yang berbeda menimbulkan hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan penuh dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut (*agency conflicts*) mendorong manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan pemegang saham perusahaan. Akibatnya, pemilik perusahaan membuat mekanisme dalam memantau aktivitas manajerial dan membatasi perilaku manajerial yang tidak diinginkan (Jensen dan Meckling, 1976). Besarnya *agency conflicts* bervariasi antar perusahaan tergantung pada manajer dengan mengabaikan maksimalisasi nilai, kompleksitas lingkungan operasi perusahaan, daya tarik perquisites, dll (Jensen dan Meckling, 1976). Demsetz dan Lehn dalam Faizal (2005) menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan digunakan perusahaan untuk menghilangkan masalah keagenan. Sedangkan level kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan (Crutchley dan Hansen dalam Faizal, 2004). Peningkatan kepemilikan saham oleh manajer tersebut, diharapkan mampu membuat manajer bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Sebagai hasilnya, struktur *corporate governance* terkait dalam membantu mengurangi konflik keagenan.

Mitton dalam Deni dkk (2004) menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan *corporate governance* mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia Timur (tahun 1997

sampai dengan tahun 1998). Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 398 perusahaan yang berada di Indonesia, Korea, Malaysia, Pilipina, dan Tailand. Perusahaan dengan kualitas pengungkapan yang lebih baik, kepemilikan pihak eksternal yang lebih terkonsentrasi, dan perusahaan yang lebih terfokus (dibandingkan dengan yang terdiversifikasi) memiliki kinerja pasar yang lebih baik. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh *governance* terhadap kinerja organisasi biasanya hanya berfokus pada mekanisme *governance* individu atau membentuk satu dimensi metrik *governance* dengan menjumlahkan variabel individunya. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada beberapa variabel terpisah yang tidak tepat untuk mengukur struktur *corporate governance* dari suatu perusahaan, dan pada umumnya menghasilkan kesalahan pengukuran (Larcker, Richardson, dan Tuna, 2007). Selanjutnya, beberapa variabel *governance* individu tersebut cenderung saling terkait, sehingga mengabaikan korelasi antar variabel yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak benar (Agrawal dan Knoeber, Bowen, Rajgopal, dan Venkatachalam dalam Aisyesha Dey, 2008).

Penelitian dengan menggunakan agregasi variabel individual *governance* telah dilakukan oleh Aiyesha Dey (2008) untuk menurunkan dimensi struktur *corporate governance*. Aiyesha Dey melakukan pengujian terhadap 22 variabel *governance* individu dan mendapatkan tujuh faktor *governance* berbeda yang menggambarkan komposisi dan fungsi dewan direksi, kompensasi eksekutif, kompensasi direksi berbasis ekuitas, independensi auditor, struktur dan fungsi komite audit, dan kontrol dewan atas kualitas pelaporan keuangan sebagai representasi dimensi *governance*. Metode ini digunakan juga oleh Larcker, Richardson, dan Tuna (2007) untuk mengukur *governance* tetapi Larcker, Richardson, dan Tuna memakai 39 indikator *governance* individu dan membentuk 14 faktor *governance*.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konflik Keagenan terhadap *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Aiyesha Dey (2008). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dengan menyesuaikan variabel-variabel yang berpengaruh ataupun pernah diteliti di Indonesia, dan pengamatan dilakukan pada perusahaan manufaktur untuk periode tahun 2002 sampai dengan 2008 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini meliputi variabel konflik keagenan terdiri dari enam faktor yang meliputi ukuran perusahaan, risiko operasi, pertumbuhan perusahaan, *leverage*, *free cash flow* dan *ownership*. Sedangkan variabel *corporate*

governance terdiri dari komite audit, jumlah komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris serta jumlah dewan komisaris independen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah konflik keagenan berhubungan dengan struktur *corporate governance* perusahaan?
2. Apakah peningkatan *governance* akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji apakah konflik keagenan perusahaan berhubungan dengan struktur *corporate governance*-nya.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah peningkatan *governance* akan membantu meningkatkan kinerja organisasi untuk perusahaan?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain.

2. Bagi perusahaan

Dapat memberikan informasi mengenai pengukuran perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaannya.